

Akuntabilitas Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APD Desa di Desa Pakijangan dan Karangjatiyar, Wonorejo, Pasuruan

Devi Ika Irawati^{1*}, Cakti Indra Gunawan², Cahyo Sasmito³
 Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang^{1,3}
 Magister Ekonomi Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang²
 *e-mail: deviikairawati.unitri@gmail.com

Dikirim	Direvisi	Diterima
13 Maret 2023	20 Maret 2023	22 Maret 2023

Abstrak

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil perlu dikelola keuangannya dengan baik guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme, faktor-faktor, serta model pelaksanaan akuntabilitas Bendahara dan Operator desa dalam rangka meningkatkan kecepatan dan ketepatan penggunaan APB Desa di Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder secara langsung terhadap Bendahara dan Operator Desa dari bulan Januari sampai Maret 2022. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme pelaksanaan akuntabilitas oleh Bendahara dan Operator Desa dilaksanakan dengan memenuhi 5 (lima) dimensi yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab, dan responsivitas. Faktor pendukung yaitu pelaporan keuangan desa yang tepat waktu, adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya pemahaman perangkat desa dalam pelaporan keuangan desa, serta seringnya pergantian perangkat desa. Model akuntabilitas penggunaan APB Desa di Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyar melibatkan peran Camat, Pemerintah Desa, serta Pihak Binwas Umum, dengan melaksanakan evaluasi. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail.

Kata Kunci: Akuntabilitas, APB Desa, Ketepatan

Abstract

The village as the smallest government system needs to manage its finances properly to support village development and improve people's welfare. This study aims to describe and analyze the mechanisms, factors, and models for implementing village Treasurer and Operator accountability to increase the speed and accuracy of using Village Budgets in Pakijangan Village and Karangjatiyar Village, Wonorejo District, Pasuruan Regency. This study uses a qualitative method by collecting primary and secondary data directly on the Village treasurer and Operators from January to March 2022. The results of this study are that the mechanism for implementing accountability by Village treasurer and Operators is carried out by fulfilling 5 (five) dimensions, namely transparency, accountability, control, responsibility, and responsiveness. Supporting factors are timely village financial reporting, transparency and accountability for village financial management while inhibiting factors are the lack of understanding of village officials in village financial reporting and frequent changes in village officials. The accountability model for using the Village Budget in Pakijangan Village and Karangjatiyar Village involves the role of the Camat, Village Government, and General Binwas Parties, by carrying out evaluations.

Keywords: Accountability, Village Budget, Correctness

PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil perlu dikelola keuangannya

dengan baik guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai

permasalahan yang ada di desa sangat kompleks. Hal inilah menjadikan alasan bagi desa agar berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Gunawan, 2016).

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah (Dewanti, 2015 ; Dewi dan Hoesada, 2020).

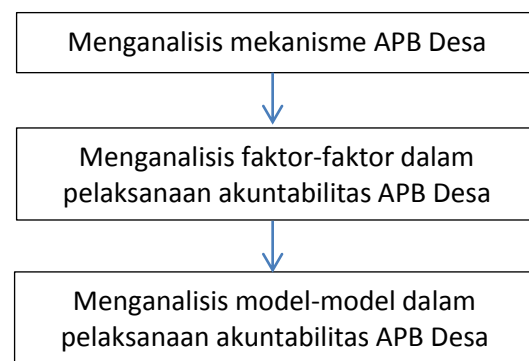
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah (Mardiasmo (2018) ; Boffa *et al.* (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan.

Dalam hal mewujudkan tujuan perekonomian sektor publik yang berhasil, maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pembangunan pada desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa Keperuntukan dana APB Desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah membiayai

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan dana desa bersumber dari dana APBN yang besarnya 10% dari total APBN.

Sayangnya, penggunaan APB Desa di Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyanar masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari program-program yang dihasilkan dari dana desa belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini diperparah dengan kualitas SDM pengelola dana desa yang minim. Alhasil, dana yang diperoleh dari APB Desa hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya seremonial, tanpa menjawab kebutuhan mendasar masyarakat desa (Hakim, 2013 ; Kriyantono *et al.*, 2015 ; Nurhayati, 2018 ; Sofi, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini membahas, menganalisis, serta mendeskripsikan tentang *Akuntabilitas Dalam Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APB Desa di Desa Pakijangan dan Karangjatiyanar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan*. Oleh karena itu, dapat digambarkan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Kerangka Pikir dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder secara langsung terhadap

Bendahara dan Operator Desa. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang menjadi objek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain - lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata - kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka - angka tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Angraeni dan Kisworo, 2020).

Sumber data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan Data Primer yaitu peneliti memperolehnya lewat narasumber yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa atau bisa juga lewat dari kreativitas penulis sendiri ketika sedang melakukan pengamatan di suatu lokasi penelitian (Martono, 2010).

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung melalui prosesi pembinaan baik di Desa maupun layanan konsultasi perangkat desa ke kantor Kecamatan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen arsip yang ada di Desa dan Kantor Kecamatan Wonorejo.

Metode Pengumpulan Data

Lokasi penelitian yaitu di 2 (dua) Desa yaitu Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyanar. Dua desa tersebut terletak di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara dua orang atau lebih, di mana seorang atau beberapa orang bertanya kepada orang lain untuk mendapatkan informasi, opini, atau pengalaman tentang topik tertentu (Fadhallah, 2021).

Peneliti melakukan wawancara terhadap bendahara dan operator desa tentang faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas

dalam rangka meningkatkan ketepatan penggunaan APB Desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa sumber data dan foto-foto pendukung lainnya sebagai rujukan yang memperkuat data penelitian (Sepang *et al*, 2021).

Peneliti melakukan dokumentasi dalam bentuk pengambilan foto, video, serta catatan hasil wawancara terhadap narasumber.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengumpulkan, membersihkan, memproses, memahami, dan menginterpretasikan data untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan yang berasal dari data tersebut (Martono, 2010).

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta data-data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah.

Teknik Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat lebih bermakna dan bermanfaat, maka data tersebut harus dianalisis dan diolah lebih lanjut. Nazir (1988) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang yang diperoleh dari hasil *interview*, dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.

Penelitian ini lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber dokumentasi, yang selanjutnya akan dideskripsikan dan diinterpretasikan secara luas. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan di bawah ini :

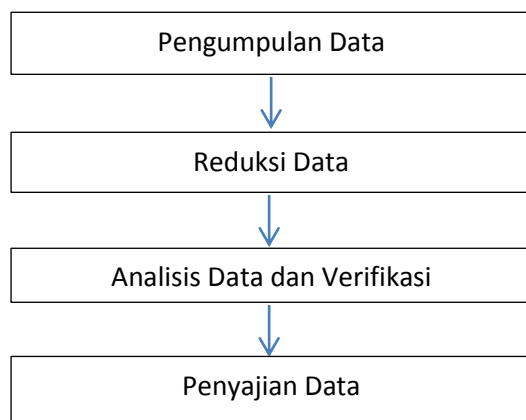
1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengambilan informasi atau data dari berbagai sumber untuk digunakan

dalam suatu tujuan tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui pengumpulan data primer maupun data sekunder.

2. Mereduksi data dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal - hal yang pokok, difokuskan pada hal - hal yang penting kemudian dicari polanya.
3. Menganalisis data dan verifikasi dengan cara menganalisis data yang diperoleh di lapangan terkait pelaksanaan kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan APB Desa
4. Menyajikan data berupa uraian naratif mengenai pelaksanaan pembinaan dan implementasinya dalam kecepatan dan ketepatan penyusunan APB Desa di Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyar, Kecamatan Wonorejo.

Secara garis besar, tahapan metode analisis data kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut (Semiawan, 2010) :



Gambar 2. Tahapan Metode Analisis Data

HASIL

Pembinaan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan

Penggunaan APB Desa di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Pembinaan dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APB Desa di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Peran Pembinaan dan Pengawasan

No.	Bentuk Peran	Pelaksanaan di Lapangan
1	Evaluasi APBDes, Pengawasan APBDes, Pengadaan Barang dan Jasa	Kecamatan dianggap mempersulitdesa dan sering kali "dilompati" oleh Pemerintah Desa dengan langsung berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2.	Peran konsultatif RKP, RAPBDES dan Dokumen Tata Usaha	Kecamatan melakukan pengendalian yang ketat namun Desa harus bolak-balik ke Kabupaten untuk konsultasi dengan dinas-dinas terkait penggunaan Dana Desa
3.	Pemantauan, Evaluasi, Koordinasi Pemerintahan Desa	Kecamatan sering kekurangan staf dikarenakan proses mutasi dan promosi sehingga Pemerintah Desa seringkali melakukan perubahan

Camat telah memberikan pelatihan kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan bimbingan dan pengawasan diberikan untuk meluruskan apa yang tidak lurus, memperbaiki apa yang salah, dan mendukung apa yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan APB desa menurut Wiguna *et al* (2018).

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan

Penggunaan APB Desa di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Faktor pendukung dalam pelaksanaan akuntabilitas oleh Bendahara dan Operator Desa dalam Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APB Desa yaitu pelaporan keuangan desa yang tepat waktu, adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, adanya pengawasan langsung dari Kecamatan kepada desa serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu perangkat desa yang kurang kompeten dalam pengelolaan dana desa, pemahaman masyarakat yang minim terhadap realisasi dana desa, minimnya pemahaman perangkat desa dalam pelaporan keuangan desa, serta seringkali pergantian perangkat desa. Faktor pendukung dan penghambat ini sesuai dengan pernyataan Perma dan Suharyono (2020) dan Sangki et al (2017).

Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak lepas dari kendala atau hambatan.

Model Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APB Desa di Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Dalam penelitian ini, Akuntabilitas Bendahara Dan Operator Desa Dalam Meningkatkan Kecepatan Dan Ketepatan Penggunaan APB Desa telah dilaksanakan dengan memenuhi 5 (lima) dimensi yaitu meliputi transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian, tanggungjawab, dan responsivitas. Maka dalam bagian pembahasan ini akan dianalisis masing-masing dimensi akuntabilitas dikaitkan dengan fenomena penggunaan dana desa.

Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyanar telah melaksanakan dimensi Transparansi dengan baik. Transparansi adalah pelaksanaan urusan publik dalam hal keterbukaan dan menjadi bentuk pengawasan, sehingga publik mampu

mengetahui proses pengelolaan keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Nurdiansyah (2016); Sayuti *et al* (2018)., serta Hulkiba *et al* (2020).

Peningkatan kualitas perangkat desa merupakan salah satu cara dalam mewujudkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di Desa yang lebih baik. Lebih jauh, Ardiyanti dan Supriyadi (2018); Rivan dan Maksum (2019) menerangkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang baik lewat komitmen dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber dana atau keuangan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan akuntabilitas oleh Bendahara dan Operator Desa dilaksanakan dengan memenuhi dimensi transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab, dan responsivitas. Faktor pendukung yaitu pelaporan keuangan desa yang tepat waktu, adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya pemahaman perangkat desa dalam pelaporan keuangan desa, serta seringkali pergantian perangkat desa. Model akuntabilitas penggunaan APB Desa di Desa Pakijangan dan Desa Karangjatiyanar melibatkan peran Camat, Pemerintah Desa, serta Pihak Binwas Umum, dengan melaksanakan evaluasi.

Saran yang disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

REFERENSI

Anggraeni, D., & Kisworo, B. (2020). Pengelolaan Program Kesehatan Masyarakat Melalui Forum Kesehatan

- Kelurahan Siaga di Kelurahan Plalangan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 23-39.
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 3(1), 1-20.
- Boffa, F., Piolatto, A., & Ponzetto, G. A. (2016). Political centralization and government accountability. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(1), 381-422.
- Dewanti, Elsa Dwi. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Universitas Jember: Jember.
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The effect of government accounting standards, internal control systems, competence of human resources, and use of information technology on quality of financial statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(1), 4-10.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ Press : Jakarta.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 8 (1), 72-102.
- Hakim, M. L. (2013). Politik Anggaran Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Hulkiba, R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2020). Akuntabilitas Pelaksanaan Apb-Desa Di Desa Tontalete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89).
- Kriyantono, R., Laturrakhmi, Y. F., Swastikawara, S., & Ari, D. P. S. (2020). Penguatan Kapasitas Tata Kelola Keuangan dan Komunikasi pada Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Gendro Pasuruan. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 36-45.
- Mardiasmo. (2018). *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Raja Grafindo Persada : Depok.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- Nurhayati, D. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis dan Manajemen)*, 1(2).
- Perma, A., & Suharyono, S. (2020). Proses Penyusunan Apb Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil. *Jurnal Iakp*, 1 (2), 63-73.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 92-100.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1 (1).

- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo : Jakarta.
- Sepang, J., Damayanti, D., Malisa, N., Sari, Y. I. P., Agustina, A. N., Mukhoirotin, M., ... & Jainurakhma, J. (2021). *Pengantar Dokumentasi Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis : Medan.
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25-35.
- Wiguna, I. M. D. P. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)(Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jimat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8(2).